

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA BARAT

*Gross Regional Domestic Product by Expenditure
Province of Jawa Barat*

2010-2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

2010 - 2014

<http://jababps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI JAWA BARAT
2010- 2014**

ISSN : 0854.9303
Nomor Publikasi : 32550.1502
Katalog BPS : 9207.32

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : 71 + vii halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Gambar Kulit:
Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran, BPS RI

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA BARAT 2010- 2014

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Gema Purwana, SE, M.Si
Editor : Ir. Hj. Ade Rika Agus, M.T

Penulis : Ir. Ninik Anisah, M.Sc
Marisa Intan, SP, MT, MPP
Yuni Anggorowati, S.ST

Pengolah data : Ir. Ninik Anisah, M.Sc
Marisa Intan, SP, MT, MPP
Yuni Anggorowati, S.ST

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bandung, 01 Juli 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Jawa Barat,

Gema Purwana SE, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Pendapatan Regional	2
1.2. Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	5
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	8
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	15
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5 Perubahan Inventori	25
2.6 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa	30
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN JAWA BARAT BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN JAWA BARAT TAHUN 2010-2014	33
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Jawa Barat Menurut Pengeluaran	34
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	39
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	45
3.4 Konsumsi Akhir Pemerintah	46
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	50
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	54
3.7 Perkembangan Ekspor	57

3.8 Perkembangan Impor	60
3.9 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	63
 BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010-2014	 65
4.1 PDRB (Nominal)	66
4.2 Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	68
4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	69
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	70
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	71
4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor	72
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	73
4.8 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	75
4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	77
4.10 <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	78
 PENUTUP	 80
 LAMPIRAN	 83
 DAFTAR PUSTAKA	 94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014	35
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014	36
Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2014	37
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2014	38
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, Tahun 2008 – 2013	39
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014	40
Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010-2014	42
Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014	43
Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014	44
Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014	45
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014	47
Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014	49
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014	52
Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014	56

Tabel 15.	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014	58
Tabel 16.	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014	61
Tabel 17.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014	67
Tabel 18.	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010 – 2014	68
Tabel 19.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2010 – 2014	70
Tabel 20.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014	71
Tabel 21.	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2010 – 2014	72
Tabel 22.	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2014	73
Tabel 23.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010-2014	74
Tabel 24.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2014	76
Tabel 25.	Rasio Perdagangan Internasional, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014	77
Tabel 26.	Incremental Capital Output Ratio, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 - 2014	79
Grafik 1.	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 - 2014	36

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat	84
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat	85
Lampiran 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat	86
Lampiran 4.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat	87
Lampiran 5.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat	88
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat	89
Lampiran 7.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat	90
Lampiran 8.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat	91
Lampiran 9.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat	92
Lampiran 10.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat	93

BAB I

PENDAHULUAN

<http://jabar.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Pengalihan, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu

(biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

- c. **Menurut Pendekatan Pengeluaran**, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<http://jabar.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Pereengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan

5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
 Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP.
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;

6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
 x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
 n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga
 i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
 j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P

mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)

- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar** **dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan

investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

3. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang

modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “reflate” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi

Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan *menginflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;
-

2.6. EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

ii Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iii Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 - 2014

<http://jabar.bps.go.id>

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 s.d 2014, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Jawa Barat digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB JAWA BARAT MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Jawa Barat menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Dalam Rencana Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, pembahasan dalam periode 2010-2014 mencakup dua tahap rencana pembangunan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Periode 2008-2013 merupakan tahapan “penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat” sedangkan periode 2013-2018 merupakan tahapan “memantapkan pembangunan secara menyeluruh”.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	609.626,57	671.158,67	734.272,45	810.168,44	872.802,98
2. Konsumsi LNPRT	6.045,26	6.396,18	6.859,56	8.518,79	9.189,59
3. Konsumsi Pemerintah	54.922,08	59.786,93	68.994,16	73.717,54	81.202,69
4. PMTB	221.524,24	252.467,43	294.079,17	307.053,89	362.665,09
5. Perubahan Inventori	44.304,28	41.947,08	73.016,38	58.549,69	77.735,83
6. Ekspor	316.311,70	386.122,92	431.031,27	440.622,39	528.976,88
7. Impor	346.048,37	396.250,60	480.007,31	439.716,27	546.613,63
Total PDRB	906.685,76	1.021.628,60	1.128.245,68	1.258.914,48	1.385.959,44

Nilai PDRB Jawa Barat Indonesia (adh Berlaku) selama periode tahun 2010 s.d 2014 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

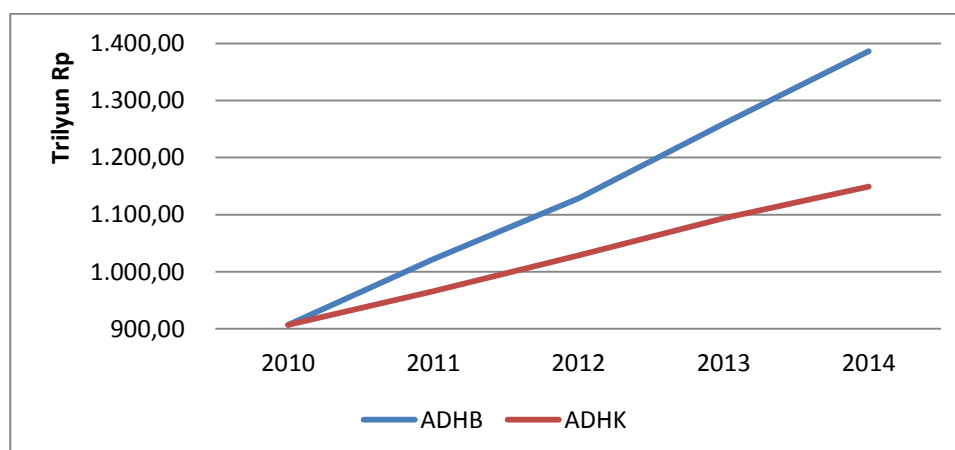
Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010-2014**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2104
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	609.626,57	636.965,21	666.398,08	693.631,38	716.194,72
2. Konsumsi LNPR	6.045,26	6.262,36	6.529,56	7.466,06	7.726,70
3. Konsumsi Pemerintah	54.922,08	54.949,79	58.348,05	58.827,92	61.314,91
4. PMTB	221.524,24	245.323,57	271.070,80	277.764,79	305.989,33
5. Perubahan Inventori	44.304,28	40.334,49	67.695,89	52.493,82	61.632,45
6. Ekspor	316.311,70	370.434,87	404.625,25	391.334,86	420.916,61
7. Impor	346.048,37	388.648,22	446.257,89	387.933,33	424.825,91
Total PDRB	906.685,76	965.622,06	1.028.409,74	1.093.585,51	1.148.948,82

Selama kurun waktu 2010–2014, gambaran tentang perkembangan ekonomi Jawa Barat berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

**Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 - 2014**



Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 – 2014**

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	67,24	65,69	65,08	64,35	62,97
1. Konsumsi LNPRT	0,67	0,63	0,61	0,68	0,66
2. Konsumsi Pemerintah	6,06	5,85	6,12	5,86	5,86
3. PMTB	24,43	24,71	26,07	24,39	26,17
4. Perubahan Inventori	4,89	4,11	6,47	4,65	5,61
5. Ekspor	34,89	37,79	38,20	35,00	38,17
6. Impor	38,17	38,79	42,54	34,93	39,44
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2010 – 2014, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 60 persen). Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 34,89 s.d 38,16 persen produk Jawa Barat mampu menembus pasar internasional maupun pasar Nasional; demikian halnya impor masih mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 34,93 s.d 42,54 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk PMTB juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 24,43 s.d 26,16 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 5,85 - 6,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2010-2012 perdagangan internasional dan antar provinsi yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai impor cenderung lebih tinggi dari nilai ekspor. Sedangkan pada tahun 2013, perdagangan internasional dan antar provinsi dalam periode tersebut menunjukkan posisi “surplus”. Pada tahun 2014 menunjukkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai impor yang menunjukkan dalam kondisi “defisit”.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 – 2014**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	-	4,48	4,62	4,09	3,25
2. Konsumsi LNPRT	-	3,59	4,27	14,34	3,49
3. Konsumsi Pemerintah	-	0,05	6,18	0,82	4,23
4. PMTB	-	10,74	10,50	2,47	10,16
5. Perubahan Inventori	-	(8,96)	67,84	(22,46)	17,41
6. Ekspor	-	17,11	9,23	(3,28)	7,56
7. Impor	-	12,31	14,82	(13,07)	9,51
Total PDRB	-	6,50	6,50	6,34	5,06

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2011 s.d 2014 secara rata-rata mencapai 6,21 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,50 persen (2011); 6,50 persen (2012); 6,34 persen (2013); dan 5,06 persen (2014). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 6,50persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2014 (5,06 persen).

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2008 - 2013**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	100,00	105,37	110,19	116,80	121,87
2. Konsumsi LNPRT	100,00	102,14	105,05	114,10	118,93
3. Konsumsi Pemerintah	100,00	108,80	118,25	125,31	132,44
4. PMTB	100,00	102,91	108,49	110,54	118,52
5. Ekspor	100,00	104,24	106,53	112,59	125,67
6. Impor	100,00	101,96	107,56	113,35	128,67
Total PDRB	100,00	105,80	109,71	115,12	120,63

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan.

¹ Indeks perkembangan

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	609.626,57	671.158,67	734.272,45	810.168,44	872.802,98
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	609.626,57	636.965,21	666.398,08	693.631,38	716.194,72
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	67,24	65,69	65,08	64,35	62,97
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	52.673,02	57.065,53	61.659,46	66.877,18	70.153,75
b. ADHK 2010	52.673,02	54.158,22	55.959,81	57.257,36	57.565,97
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	14.102,88	15.274,85	16.447,47	17.868,42	18.961,78
b. ADHK 2010	14.102,88	14.496,65	14.927,10	15.298,17	15.559,44
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi RT	-	4,48	4,62	4,09	3,25
b. Per-RT	-	2,82	3,33	2,32	0,54
c. Perkapita	-	2,79	2,97	2,49	1,71
Jumlah RT (<i>unit</i>)	11.573.793	11.761.192	11.908.513	12.114.274	12.441.287
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	43.227,1	43.938,8	44.643,5	45.340,8	46.029,6

Data berikut, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2014 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010 s.d 2014 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu 67,24 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 62,97 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2010, secara umum setiap rumah tangga di Indonesia menghabiskan dana sekitar 14.102,88 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 15.274,85 ribu rupiah (2011); 16.447,47 ribu rupiah (2012); 17.868,42 ribu rupiah (2013); dan menjadi 18.961,78 ribu rupiah (2014).

Sementara itu, pada perkiraan adh Konstan 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 2 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 3,33 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Jawa Barat meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 1,71 s.d 2,97 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

**Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014³(Persen)**

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	34,57	35,49	36,67	37,70	39,38
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,42	4,26	4,35	4,32	4,10
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,10	12,54	12,12	12,28	11,97
d. Kesehatan & Pendidikan	6,46	6,26	6,05	6,04	6,01
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	28,56	28,57	27,86	27,18	26,12
f. Hotel & Restoran	7,28	7,05	6,95	6,70	6,55
g. Lainnya	5,60	5,83	5,99	5,77	5,87
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 4.48 persen tahun 2011. Kemudian, meningkat pada tahun berikutnya yaitu 4,62 persen (2012), dan melambat menjadi 4,09 persen (2013). Selanjutnya pada tahun 2014 konsumsi rumah tangga kembali melambat yaitu sebesar 3,25 persen. Sementara itu, konsumsi per-kapita meningkat sebesar 2,79 persen di tahun 2011 dan 2,97 persen ditahun 2012. Namun pada tahun berikutnya (2013 dan 2014) melambat menjadi 2,49 persen dan 1,71 persen. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Secara rata-rata dari tahun 2010 s.d 2013, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Indonesia, bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 34,57 persen (2010) ; 35,49 persen (2011) ; 36,67 persen (2012) ; 37,70 persen (2013) ; dan 39,38 persen (2014).

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014 (Persen)

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-	4,11	4,33	4,22	5,72
b. Pakaian dan Alas Kaki	-	3,63	9,54	7,95	1,51
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-	1,86	3,27	3,77	1,84
d. Kesehatan & Pendidikan	-	4,24	2,92	7,23	4,97
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-	4,99	4,53	3,23	0,71
f. Hotel & Restoran	-	4,94	6,07	3,37	(0,26)
g. Lainnya	-	10,72	6,08	2,71	8,01

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 3,67 persen (2010); 4,68 persen (2011) ; 4,77 persen (2012) ; 4,02 persen (2013) ; dan 1,96 persen (2014). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014⁴(Persen)

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-	8,58	8,34	8,84	6,44
b. Pakaian dan Alas Kaki	-	2,20	1,99	1,66	0,73
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-	3,46	2,40	7,69	3,12
d. Kesehatan & Pendidikan	-	2,34	2,86	2,71	2,11
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-	4,89	2,08	4,26	2,80
f. Hotel & Restoran	-	1,62	1,67	2,87	5,59
g. Lainnya	-	3,40	5,96	3,59	1,34

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga (inflasi) relatif tinggi terjadi pada tahun 2010, namun pada tahun-tahun berikutnya peningkatan harga relatif stabil. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 8,58 persen (2011); 8,34 persen (2012); 8,34 persen (2013) dan 6,44 persen (2014). Sementara itu, konsumsi pakaian dan alas kaki dari menjadi 2,20 persen (2011). Kemudian pada tahun berikutnya yaitu 1,99 persen (2012); 1,66 persen (2013); dan 0,73 persen (2014). Pada periode tahun 2011 s.d 2014, harga kelompok makanan meningkat lebih tinggi dari kelompok konsumsi lainnya.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	6.045,26	6.396,18	6.859,56	8.518,79	9.189,59
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	6.045,26	6.262,36	6.529,56	7.466,06	7.726,70
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,67	0,63	0,61	0,68	0,66

Nilai konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) selalu meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Institusi ini merupakan lembaga non pemerintah yang dibiayai secara mandiri oleh masyarakat. Dalam pembahasan global dikenal dengan istilah civil society. Peranan konsumsi LNPRT kurang signifikan, pada tahun 2010 sebesar 0,67 persen, menurun selama dua tahun berturut-turut menjadi 0,63 persen pada tahun 2011 dan 0,61 pada tahun 2012. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,68 persen namun menurun di tahun 2014 menjadi 0,66 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian provinsi Jawa Barat serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlakau maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlakau sebesar 54.922,08 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2014 nilainya mencapai 81.202,69 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami penurunan, dari 6,06 persen di tahun 2010 menjadi 5,86 persen pada tahun 2014. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2011; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2012 yang mencapai 6,12 persen. Peningkatan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	54.922,08	59.786,93	68.994,16	73.717,54	81.202,69
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	54.922,08	54.949,79	58.348,05	58.827,92	61.314,91
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	6,06	5,85	6,12	5,86	5,86
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	1.270,55	1.360,69	1.545,45	1.625,85	1.764,14
b. ADHK 2010	1.270,55	1.250,60	1.306,98	1.297,46	1.332,08
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	115.021,03	130.325,44	153.620,08	170.712,41	182.277,66
b. ADHK 2010	115.021,03	119.781,29	129.915,82	136.231,56	137.635,08
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	-	0,05	6,18	0,82	4,23
b. Konsumsi perkapita	-	(1,57)	4,51	(0,73)	2,67
c. Konsumsi per-pegawai	-	4,14	8,46	4,86	1,03
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁶	477.496	458.751	449.122	431.823	445.489
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	43.227,10	43.938,80	44.643,50	45.340,80	46.029,60

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 1.270,55 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 9).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 9). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 3,97 persen pada tahun 2010, namun pada 2011 pertumbuhannya negatif yaitu sebesar minus 1,57 persen. Pada tahun 2012 meningkat 4,51 persen dan kembali menurun pada tahun 2013 sebesar minus 0,73 persen. Pada tahun 2014 meningkat 2,67 persen.

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

⁶ Tidak termasuk polisi dan militer

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 115.021,03 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 9). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 8,46 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Selama periode tahun 2010 s.d 2014 jumlah pegawai pemerintah mengalami penurunan. Pada tahun 2010 jumlah pemerintah berjumlah 477.496 orang; menurun menjadi 458.751 orang di tahun 2011. Penurunan terus terjadi terkait dengan kebijakan moratorium penerimaan PNS. Dalam kurun waktu 2010 - 2014, secara total terjadi penurunan jumlah pegawai pemerintah sebanyak 32.007 orang atau turun sebesar 6,70 persen dari tahun 2010.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan 2012, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 5,88 persen dan 6,18 persen; untuk konsumsi per-kapita 3,97 persen dan 4,51 persen; sedangkan untuk konsumsi per-pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan 2012 yaitu 7,06 persen dan 8,46 persen.

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Sekitar 55 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 10). Namun proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 proporsinya mencapai 54,85 persen dan pada tahun 2011 naik menjadi 55,24 persen. Pada tahun 2012 menurun menjadi 54,55 persen dan meningkat kembali di tahun 2013 menjadi 56,47 persen, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 57,08 persen.

Konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ketahun (lihat tabel 10). Secara umum, proporsi konsumsi individu pada periode 2010-2014 juga cenderung menurun. Hanya pada tahun 2012 saja proporsinya meningkat menjadi 45,45 persen.

**Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah ⁷					
a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp)	54.922,08	59.786,93	68.994,16	73.717,54	81.202,69
(%)	54,85	55,24	54,55	56,47	57,08
b. Konsumsi Individu (Miliar Rp)	30.126,86	33.026,76	37.638,70	41.628,11	46.353,99
(%)	45,15	44,76	45,45	43,53	42,92
Total Konsumsi (Miliar Rp)	24.795,22	26.760,17	31.355,45	32.089,44	34.848,70
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan riil (ADHK2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	-	(0,28)	6,30	4,31	3,91
b. Konsumsi Individu	-	0,45	6,05	(3,39)	4,64
Total Konsumsi	-	0,05	6,18	0,82	4,23
Pertumbuhan indeks harga (%) implisit ⁸					
a. Konsumsi Kolektif	-	9,93	7,21	6,03	7,16
b. Konsumsi Individu	-	7,44	10,49	5,93	3,78
Total Konsumsi	-	8,80	8,68	5,97	5,69

Hal lain yang patut dicermati adalah rasio, yaitu perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah mengalami peningkatan secara gradual dari yang sebesar 477.496 orang (2010) menjadi 445.489 orang (2014). Begitu juga jumlah penduduk meningkat dari sejumlah 43.227,10 ribu orang pada tahun 2010 menjadi 46.029,60 ribu orang pada tahun 2014. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut cenderung menurun dengan masing-masing adalah 90,53 (2010), 95,78 (2011), 99,40 (2012), 105,00 (2013), dan 103,32 (2014). Hal ini berarti pada tahun 2010 setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 90 penduduk, dan pada tahun 2014 menjadi sekitar 103 penduduk.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

System of National Accounts (SNA 2008) merupakan rekomendasi standar pengukuran aktivitas ekonomi wilayah, menempatkan aktivitas Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai bagian dari set neraca ekonomi makro yang komprehensif, konsisten, dan terintegrasi. Pembentukan Modal Tetap Bruto terdiri dari nilai perolehan produsen atas jenis produk, baik yang baru dan yang sudah ada, dikurangi nilai pelepasan aset tetap dari jenis yang sama. Estimasi nilai PMTB yaitu total nilai perolehan produsen kurang nilai pelepasan aset tetap selama periode neraca, ditambah dengan nilai pengeluaran atas jasa yang menambah nilai dari aset non-produksi.

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁸ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Komponen PMTB pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan yang direalisasikan menjadi investasi fisik. Pada sisi yang berbeda diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selama lima tahun terakhir (2010-2014) nilai PMTB adh Berlaku setiap tahun berturut-turut mengalami kenaikan, tercatat pada tahun 2010 nilai PMTB masih sebesar 221.524 miliar rupiah kemudian pada tahun 2014 telah mencapai 362.665 miliar rupiah atau selama periode tersebut mengalami penambahan nilai sebesar 141.141 miliar rupiah. Peningkatan tersebut sejalan dengan nilai PMTB adh Konstan 2010 yang mengalami peningkatan nilai berturut-turut setiap tahun, tercatat pada tahun 2010 mencapai 305.989 miliar rupiah. Peningkatan nilai PMTB adh Konstan 2010 menggambarkan pertumbuhan riil komponen PMTB di Jawa Barat selama lima tahun terakhir karena nilainya tidak dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan harga komponen PMTB.

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	221.524,24	252.467,43	294.079,17	307.053,89	362.665,09
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	221.524,24	245.323,57	271.070,80	277.764,79	305.989,33
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	24,43	24,71	26,07	24,39	26,17
<u>Struktur PMTB [1]</u>					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	151.644,25	172.293,01	201.886,56	217.457,61	268.802,00
(%)	16,73	16,86	17,89	17,27	19,39
b. Non Bangunan (<i>Mil Rp</i>)	69.879,99	80.174,42	92.192,61	89.596,29	93.863,09
(%)	7,71	7,85	8,17	7,12	6,77
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	221.524,24	252.467,43	294.079,17	307.053,89	362.665,09
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Pertumbuhan[2] (%)</u>					
a. Bangunan	-	9,81	12,07	5,41	15,90
b. Non Bangunan	-	12,77	7,17	(4,04)	(3,76)
Total PMTB	-	10,74	10,50	2,47	10,16

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

⁹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Sementara pertumbuhan komponen PMTB di tahun 2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,50 persen. Hal ini didukung oleh perekonomian nasional yang berangsur membaik pada tahun 2010, setelah terjadi krisis ekonomi global tahun 2007-2008 akibat *subprime mortgage* sehingga terjadi resesi ekonomi di Amerika Serikat. Fakta ini menimbulkan sentimen negatif terhadap kondisi perekonomian global termasuk berdampak terhadap perekonomian Indonesia yang mengalami perlambatan pertumbuhan.

Selain itu sejalan dengan pertumbuhan positif impor luar negeri pada tahun 2010-2011, dimana komposisi kedua terbesar impor luar negeri Jawa Barat merupakan impor barang modal dengan rata-rata proporsi dari total impor selama periode 2010-2014 sebesar 16,34 persen. Barang modal yang berasal dari impor tersebut dipakai oleh produsen domestik untuk menghasilkan barang dan jasa.

Pada tahun 2011-2012 komponen PMTB mengalami pertumbuhan signifikan di atas 10 persen. Pertumbuhan komponen PMTB pada tahun 2011 didukung oleh pertumbuhan impor luar negeri tinggi sebesar 11,29 persen pada periode tersebut, dimana lebih dari 17 persen dari impor luar negeri Jawa Barat merupakan impor barang modal yang berlaku sebagai asset fisik suatu institusi sebagai pelaku ekonomi. Sementara pertumbuhan komponen PMTB pada tahun 2012 sejalan dengan peningkatan pertumbuhan signifikan pada Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,18 persen dimana hal ini mengindikasikan realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah yang cukup tinggi pada periode tersebut.

Apabila diamati selama periode 2011-2014 terlihat bahwa perlambatan pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 2,47 persen. Fakta ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan yang signifikan pada komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah pada tahun 2013 sebesar 0,82 persen, dimana menggambarkan realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah yang relative rendah pada tahun 2013 termasuk di dalamnya belanja modal. Lebih lanjut, sektor pemerintahan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang melakukan aktivitas pembentukan modal tetap bruto, selain rumah tangga, LNPRT dan swasta.

Sementara itu pertumbuhan komponen PMTB dipengaruhi oleh pertumbuhan sub komponen PMTB yaitu bangunan dan non bangunan. Selama periode 2011-2014 sub komponen bangunan mengalami pertumbuhan positif dimana mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 15,90 persen. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,41 persen. Lebih lanjut, pada sub komponen non bangunan mengalami pertumbuhan berfluktuasi sepanjang periode 2011-2014. Tercatat pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2011-2012 dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 12,77 persen. Sub komponen non

bangunan mengalami pertumbuhan terkontraksi berturut-turut selama dua tahun terakhir (2013-2014). Penurunan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu minus 4,04 persen kemudian tahun 2014 kembali mengalami penurunan minus 3,76 persen.

Secara proporsi dalam komponen PMTB maka sub komponen bangunan memiliki peranan lebih besar dibandingkan dengan sub komponen non bangunan. Tercatat kontribusi sub komponen bangunan selama periode 2010-2012 berada pada posisi di atas 68 persen, kemudian berangsur meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 70,82 persen. Kontribusi terbesar sub komponen bangunan terjadi pada tahun 2014 menjadi sebesar 74,12 persen dimana fakta ini menunjukkan pembangunan fisik mengalami perkembangan secara signifikan di Jawa Barat selama lima tahun terakhir. Sementara itu selama 5 (lima) tahun terakhir sub komponen bangunan memiliki tendensi kontribusi yang semakin menurun terhadap total PMTB. Tercatat selama periode 2010-2012 sub komponen non bangunan berada pada posisi di atas 31 persen. Hal ini terutama terlihat pada dua tahun terakhir 2013-2014 dimana pada tahun 2013 memiliki proporsi sebesar 29,18 persen, tahun 2014 kembali mengalami penurunan proporsi sebesar 25,88 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Menurut SNA 2008 cakupan inventori adalah persediaan yang dikuasai oleh unit yang menghasilkan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan pada pihak lain, atau digunakan dengan cara lain. Lebih lanjut, persediaan ini dikuasai oleh unit yang menghasilkan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan pada pihak lain, atau digunakan dengan cara lain.

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk persediaan berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Inventori atau persediaan diperlukan dalam suatu proses produksi sehingga keberadaannya sangat krusial bagi kontinuitas proses produksi. Upaya menjamin kontinuitas inventori dalam suatu rentang waktu dapat dilakukan dengan mengamati perubahan inventori antar periode. Perubahan inventori dapat dijadikan indikator peningkatan atau penurunan produksi pada periode selanjutnya, hal ini bergantung dari siklus produksi masing-masing barang.

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net

ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB	44.304,28	41.947,08	73.016,38	58.549,69	77.735,83
b. ADHK	44.304,28	40.334,49	67.695,89	52.493,82	61.632,45
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	4,89	4,11	6,47	4,65	5,61

Perubahan inventori pada tahun 2010 sebesar 44.304 miliar rupiah dengan kontribusi terhadap perekonomian Jawa Barat sebesar 4,89 persen. Pada tahun 2011 perubahan inventori mengalami pengurangan sebesar 2.357 miliar rupiah sehingga berada pada level 41.947 miliar rupiah, hal ini berdampak mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian Jawa Barat menjadi sebesar 4,11 persen. Perubahan inventori mengalami penambahan signifikan pada tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 31.069 miliar rupiah sehingga nilai perubahan inventori menjadi sebesar 73.016 miliar rupiah. Peningkatan nilai inventori secara langsung berdampak terhadap peningkatan kontribusi komponen perubahan inventori terhadap perekonomian Jawa Barat menjadi sebesar 6,47 persen.

Sementara itu pada tahun 2013 perubahan inventori mengalami pengurangan sebesar 14.466 miliar rupiah sehingga nilai perubahan inventori menjadi sebesar 58.550 miliar rupiah, hal ini memberi dampak secara langsung terhadap penurunan kontribusi komponen ini terhadap perekonomian Jawa Barat menjadi sebesar 4,65 persen. Komponen perubahan inventori kembali

mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 19.186 miliar rupiah sehingga nilai komponen ini menjadi 77.736 miliar rupiah sehingga kontribusi terhadap perekonomian kembali meningkat menjadi sebesar 5,61 persen.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor luar negeri dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas proses produksi, distribusi, pemasaran, SDM, manajerial dan kualitas dimana kesemua faktor tersebut harus memenuhi standar tertentu. Hal ini akan berdampak terhadap biaya produksi dan harga produk akhir sehingga pada akhirnya akan menentukan daya saing produk barang dan jasa dalam tataran global. Sementara faktor eksternal meliputi : (1) kondisi perekonomian global terutama negara-negara raksasa ekonomi sebagai tujuan ekspor utama, (2) harga komoditas di tingkat internasional serta (3) aspek legal perdagangan internasional yang ditetapkan oleh *World Trade Organization* (WTO).

**Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	226.580,61	244.867,28	261.968,65	280.459,29	329.487,87
b. ADHK 2000 (Miliar Rp)	226.580,61	239.424,31	254.271,20	258.087,70	271.291,62
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	24,99	23,97	23,22	22,28	23,77
Struktur Ekspor[1]					
a. Barang (Miliar Rp)	223.686,42	241.298,46	257.591,98	275.368,63	323.592,78
(%)	98,72	98,54	98,33	98,18	98,21
b. Jasa (Miliar Rp)	2.894,19	3.568,82	4.376,67	5.090,65	5.895,09
(%)	1,28	1,46	1,67	1,82	1,79
Total ekspor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan[2]					
- Barang	-	5,48	6,06	1,45	5,14
- Jasa	-	20,19	15,70	4,78	3,65
Total ekspor	-	5,67	6,20	1,50	5,12

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ ADHK 2010)

Secara makro ekonomi ditinjau dari struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah Jawa Barat tidak seluruhnya dilakukan oleh residen, tetapi terdapat permintaan dari non residen. Permintaan barang dan jasa terhadap produk domestik dari non residen dimana diwujudkan dalam aktivitas perdagangan internasional berupa transaksi ekspor.

Selama lima tahun terakhir (2010-2014) nilai ekspor Jawa Barat secara berturut-turut mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menjadi indikasi positif bagi perekonomian Jawa Barat, dimana menunjukkan peningkatan permintaan luar negeri terhadap barang dan jasa produksi Jawa Barat. Komponen ekspor berlaku sebagai faktor penambah bagi perekonomian sekaligus memberikan pengaruh terhadap penambahan devisa negara. Tercatat nilai ekspor adh Berlaku pada tahun 2014 mencapai 329.488 miliar rupiah sementara nilai pada tahun 2010 masih mencapai 226.581 miliar rupiah sehingga selama lima tahun terakhir mengalami penambahan nilai sebesar 102.907 miliar rupiah. Hal ini sejalan dengan nilai ekspor adh Konstan 2010 secara berturut-turut selama lima tahun terakhir (2010-2014) mengalami kenaikan, tercatat pada tahun 2014 mencapai 271.292 miliar rupiah. Fakta ini menunjukkan peningkatan kinerja komponen ekspor terhadap perekonomian Jawa Barat selama 5 (lima) tahun terakhir.

Kontribusi komponen ekspor terhadap perekonomian selama lima tahun terakhir (2010-2014) mencapai di atas 22 persen. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 24,99 persen, sementara kontribusi terendah komponen ini terjadi pada tahun 2013 sebesar 22,28 persen. Lebih jauh, meski mengalami penurunan kontribusi pada tahun 2013 tetapi nilai komponen ini mengalami peningkatan.

Apabila dicermati lebih lanjut komposisi ekspor Jawa Barat mayoritas merupakan ekspor barang dengan rata-rata selama lima tahun terakhir (2010-2014) sebesar 98,40 persen, sisanya merupakan ekspor jasa dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun terakhir sebesar 1,60 persen. Pelemahan harga komoditas non migas internasional sangat berpengaruh terhadap kinerja ekspor Jawa Barat dikarenakan mayoritas ekspor Jawa Barat merupakan ekspor barang non migas.

Selama periode 2011-2014 ekspor Jawa Barat tahunan mengalami pertumbuhan positif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,20 persen. Sementara laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 1,50 persen atau mengalami perlambatan pertumbuhan

dibandingkan tahun 2012. Perlambatan ekspor Jawa Barat pada tahun 2013 ini sebagai dampak dari kondisi perekonomian dunia yang belum membaik, terutama negara-negara tujuan ekspor utama Jawa Barat seperti Amerika Serikat, Jepang dan China dengan pengurangan permintaan ekspor. Pertumbuhan ekspor barang secara level tidak berbeda jauh dengan ekspor total karena sharenya yang besar sehingga pergerakannya pun searah dengan ekspor total. Sementara ekspor jasa selama lima tahun terakhir (2010-2014) mengalami pertumbuhan positif, dengan kecenderungan perlambatan pertumbuhan dari tahun ke tahun setelah puncak pertumbuhan di tahun 2011 sebesar 20,19 persen hingga pada tahun 2014 pertumbuhan ekspor jasa kembali melambat sebesar 3,65 persen dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	136.658,47	160.660,65	162.875,84	174.967,76	185.811,81
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	136.658,47	152.080,77	142.905,28	145.679,50	146.956,07
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	15,07	15,73	14,44	13,90	13,41
<u>Struktur Impor [1]</u>					
a. Barang (<i>Mil Rp</i>)	124.081,52	147.952,46	148.850,91	157.916,85	164.006,48
(%)	90,80	92,09	91,39	90,25	88,26
b. Jasa (<i>Mil Rp</i>)	12.576,95	12.708,19	14.024,93	17.050,91	21.805,34
(%)	9,20	7,91	8,61	9,75	11,74
Total impor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Pertumbuhan[2]</u>					
- Barang	-	12,29	-6,69	1,60	-0,35
- Jasa	-	1,34	1,11	5,36	12,83
Total impor	-	11,29	-6,03	1,94	0,88

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan penambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Indonesia di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Nilai komponen impor luar negeri adh Berlaku pada periode lima tahun terakhir (2010-2014) memiliki kecenderungan yang meningkat pada tahun 2010 nilai impor mencapai 136.658 miliar rupiah kemudian pada tahun 2014 telah mencapai 185.812 miliar rupiah atau selama periode lima tahun terakhir mengalami penambahan nilai sebesar 49.154 miliar rupiah. Sementara itu nilai komponen impor luar negeri adh Konstan 2010 selama periode 2010-2014 hanya mengalami penurunan nilai pada tahun 2012 yaitu sebesar 142.905 miliar dibandingkan dengan tahun 2011 dengan nilai sebesar 152.081 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2013-2014 nilai komponen impor luar negeri berturut-turut mengalami peningkatan meski tidak besar.

Apabila dicermati selama periode 2010-2014 nilai komponen impor luar negeri adh Berlaku berturut-turut mengalami kenaikan, hal ini berkontradiksi dengan keadaan nilai impor luar negeri adh Konstan 2010 yang menurun pada tahun 2012. Pada dua tahun berikutnya (2013-2014) nilai impor luar negeri mengalami peningkatan tidak signifikan. Pola ini menjadi indikasi harga komoditas impor mengalami peningkatan signifikan tiap periode, sementara di tahun 2012 aktivitas impor luar negeri Jawa Barat mengalami penurunan. Penurunan impor merupakan indikasi positif bagi perekonomian Jawa Barat dimana impor berlaku sebagai pengurang terhadap perekonomian dan menunjukkan penurunan ketergantungan terhadap produk non residen.

Kontribusi komponen impor luar negeri dalam perekonomian Jawa Barat selama periode 2010-2014 menunjukkan tendensi yang semakin menurun. Pada tahun 2010 komponen impor luar negeri memberikan kontribusi sebesar 15,07 persen, penurunan kontribusi terjadi mulai tahun 2012 hingga pada tahun 2014 kontribusi komponen ini sebesar 13,41 persen.

Menurut komposisi impor, mayoritas impor Jawa Barat merupakan impor barang dengan rata-rata selama lima tahun terakhir (2010-2014) sebesar 90,56 persen, sedangkan sisanya merupakan impor jasa dengan rata-rata sebesar 9,44 persen. Komponen impor luar negeri Jawa Barat menurut klasifikasi *Broad Economic Categories* (BEC) dibedakan menurut kategori akhir penggunaan barang dan rata-rata proporsi periode 2010-2014 yaitu (1) impor bahan baku sebesar

79,37 persen (2) impor barang modal sebesar 16,34 persen dan (3) impor barang konsumsi sebesar 4,29 persen.

Komponen impor secara riil mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2011 sebesar 11,29 persen. Pada tahun 2012 pertumbuhan impor berkontraksi sebesar minus 6,03 persen. Penurunan kinerja impor berkaitan dengan pelemahan ekonomi global karena mayoritas impor Jawa Barat merupakan impor bahan baku yang dipakai untuk produksi, dimana produksi sendiri sangat tergantung terhadap permintaan ekspor. Hal ini dapat diamati dari perlambatan pertumbuhan permintaan ekspor pada tahun 2013 sebesar 1,50 persen.

Pada tahun 2013 komponen impor secara riil kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,94 persen meski demikian kenaikan ini tidak serta merta mendongkrak proporsi komponen ini dalam perekonomian Jawa Barat. Perlambatan pertumbuhan komponen impor luar negeri sebesar 0,88 persen terjadi pada tahun 2014, dimana hal ini dapat dijadikan momentum yang baik bagi peningkatan kinerja ekonomi Jawa Barat.

Pertumbuhan impor luar negeri dalam bentuk barang selama 2011-2014 relative sejalan dengan impor total disebabkan oleh faktor proporsi yang besar, kecuali pada tahun 2014 pertumbuhannya tidak sejalan dengan impor total dimana mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 0,35 persen. Sementara impor luar negeri dalam bentuk jasa selama periode tersebut mengalami pertumbuhan positif, meski demikian terjadi perlambatan pertumbuhan pada tahun 2011 sebesar 1,34 persen kemudian kembali melambat pada tahun berikutnya sebesar 1,11 persen.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

<http://jabar.bps.go.id>

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 - 2014

<http://jabar.bps.go.id>

Agregat dari PDRB merupakan nilai gabungan yang mengukur aspek tertentu dari aktivitas dari keseluruhan ekonomi. Agregat tersebut merupakan besaran pokok dan indikator ringkas untuk tujuan analisis ekonomi makro, perbandingan antar waktu maupun antar wilayah.

Analisis perkembangan agregat PDRB digunakan dalam analisis sosial ekonomi suatu wilayah yang meliputi perbandingan atau rasio antar komponen seperti perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap nilai ekspor, PMTB dan PDRB total. Demikian juga perbandingan antar nilai ekspor terhadap PMTB, nilai PDRB terhadap impor, keseimbangan total penyediaan dengan total permintaan dan neraca perdagangan. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB Pengeluaran merupakan jumlah konsumsi akhir atas barang dan jasa (semua konsumsi kecuali konsumsi antara), yang diukur pada harga pembeli kemudian dikurangi dengan impor barang dan jasa. Dengan demikian nilai PDRB ini, dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik.

Dari series data PDRB Pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain seperti rumah tangga dan tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan satu wilayah dapat didekati dengan nilai dari data PDRB perkapita.

**Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	906.685,76	1.021.628,60	1.128.245,68	1.258.914,48	1.385.959,44
- ADHK 2010	906.685,76	965.622,06	1.028.409,74	1.093.585,51	1.148.948,82
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	20.974,94	23.251,17	25.272,29	27.765,60	30.109,92
- ADHK 2010	20.974,94	21.976,53	23.036,00	24.119,24	24.961,05
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,73	4,78	4,82	4,70	3,49
Jumlah penduduk (000 org)	43.227	43.939	44.644	45.341	46.030
Pertumbuhan	1,84	1,65	1,60	1,56	1,52

Seiring dengan peningkatan nilai total PDRB Provinsi Jawa Barat, maka PDRB per-kapita menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 17), meskipun dari sisi jumlah penduduk juga mengalami peningkatan. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Provinsi Jawa Barat secara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

PDRB per-kapita Provinsi Jawa Barat di tahun 2010 mencapai Rp. 20.974,94 ribu rupiah dan di tahun 2014 meningkat hingga mencapai Rp30.113,61 ribu rupiah. Peningkatan per-kapita pada kisaran 4 persen dari tahun 2010 sampai tahun 2013, adapun di tahun 2014 melambat pada kisaran 3 persen. Adapun pertumbuhan jumlah penduduk mengalami perlambatan dari 1,84% di tahun 2010 menjadi 1,52% di tahun 2014. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga adalah pengeluaran yang terdiri dari konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga residen. Konsumsi ini meliputi konsumsi yang diperoleh dari pembelian juga perkiraan transaksi barter yaitu barang dan jasa yang diterima dari pihak lain dan barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi sendiri.

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam PDRB Provinsi Jawa Barat (sekitar 65 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Jawa Barat sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun demikian, besaran yang di konsumsi rumah tangga didalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	609.626,57	671.158,67	734.272,45	810.168,44	872.802,98
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	316.311,70	386.122,92	431.031,27	440.622,39	528.976,88
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,93	1,74	1,70	1,84	1,65

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 konsumsi akhir

rumah tangga mencapai Rp. 609,63 triliun dan pada tahun 2014 meningkat hingga Rp. 872,80 triliun, demikian pula untuk total ekspor Jawa Barat di tahun 2010 masih Rp. 316,3 triliun dan di tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 529,0 triliun.

Selama kurun waktu 2010-2014 perbandingan antara konsumsi akhir rumah tangga dengan ekspor diperoleh bahwa rata-ratanya mencapai 1,77. Hal ini memberi gambaran bahwa produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga di wilayah Provinsi Jawa Barat hampir mencapai dua kali lipat dari produk yang digunakan untuk ekspor. Nilai perkembangan perbandingan antara konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor tiap tahun diperoleh bahwa di tahun 2010 nilainya paling tinggi dibanding tahun kedepannya. Tahun Menurunnya nilai perbandingan ini memberikan gambaran bahwa tingkat kenaikan konsumsi rumah tangga tidak sebesar kenaikan di ekspor, hal ini masih memberikan harapan bagi Provinsi Jawa Barat untuk bisa meningkatkan nilai ekpornya baik dalam negeri maupun luar negeri.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diukur dengan total nilai perolehan kurang pelepasan aset tetap milik produsen selama periode neraca, tambah pengeluaran atas jasa tertentu yang menambah nilai aset tak diproduksi. Rasio perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan PMTB dimaksudkan untuk mengamati berapa besar penggunaan produk untuk konsumsi akhir rumah tangga dan PMTB . Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah Provinsi Jawa Barat digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga adapun untuk PMTB masih jauh tertinggal hanya 1/3 dari total konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	609.626,57	671.158,67	734.272,45	810.168,44	872.802,98
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	221.524,24	252.467,43	294.079,17	307.053,89	362.665,09
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2,75	2,66	2,50	2,64	2,41

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun. Rata-rata rasio selama kurun waktu 2010-2010 sebesar 2,59 yang artinya produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga mencapai 2 kali lipat lebih dibandingkan digunakan untuk konsumsi PMTB. Perkembangan nilai rasio ini dari sebesar 2,92 pada tahun 2010

menjadi 2,64 pada tahun 2014. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan nilai investasi terjadi secara signifikan dibandingkan dengan perkembangan konsumsi akhir rumah tangga.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir. Pelaku konsumsi akhir ini tidak termasuk pengeluaran untuk aset tetap dalam bentuk tempat tinggal atau barang berharga. Pengeluaran rumah tangga untuk tempat tinggal pembentukan modal tetap bruto.

**Tabel 20. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	609.626,57	671.158,67	734.272,45	810.168,44	872.802,98
b. LNPRT	6.045,26	6.396,18	6.859,56	8.518,79	9.189,59
c. Pemerintah	54.922,08	59.786,93	68.994,16	73.717,54	81.202,69
Jumlah	670.593,91	737.341,77	810.126,17	892.404,77	963.195,26
PDRB (ADHB) (Milyar Rp)	906.685,76	1.021.628,60	1.128.245,68	1.258.914,48	1.385.959,44
Proporsi (%)	73,96	72,17	71,80	70,89	69,50

Tabel 20, menggambarkan proporsi total konsumsi akhir dari rumah tangga, LNPRT dan pemerintah yang mencapai rata-rata 71,66 persen yang sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga kemudian diikuti oleh konsumsi pemerintah dan terakhir konsumsi LNPRT. Perkembangan nilai konsumsi akhir setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, namun demikian proporsinya terhadap PDRB semakin menurun. Pada tahun 2010 proporsi konsumsi akhir mencapai 73,96 persen di tahun 2014 menurun hingga 69,49 persen. Hal ini memberi gambaran bahwa pembentukan PDRB selain oleh konsumsi, komponen lainnya yaitu komponen dari PMTB dan ekspor tumbuh dengan baik .

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula

berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	316.311,70	386.122,92	431.031,27	440.622,39	528.976,88
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	221.524,24	252.467,43	294.079,17	307.053,89	362.665,09
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,43	1,53	1,47	1,44	1,46

Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Rasio ekspor terhadap PMTB dari tahun 2010-2014 mempunyai nilai rata-rata 1,46 (Tabel 21) yang artinya produk yang digunakan untuk ekspor lebih besar dari pada digunakan untuk PMTB. Dari tahun ke tahun rasio ini hampir stabil hanya di tahun 2011 nilai rasionya mencapai 1,53 dan ini merupakan angka tertinggi.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	906.685,76	1.021.628,60	1.128.245,68	1.258.914,48	1.385.959,44
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	346.048,37	396.250,60	480.007,31	439.716,27	546.613,63
Rasio PDRB terhadap Impor	2,62	2,58	2,35	2,86	2,54

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2010-2014 menunjukkan trend yang semakin menurun dengan kecuali di tahun 2013 yang justru meningkat. Hal ini memberi gambaran tingkat ketergantungan terhadap produk impor semakin meningkat kecuali di tahun 2013 yang

disebabkan oleh nilai impor berkurang disamping peningkatan nilai PDRB-nya. Pada tahun 2010 rasionya mencapai 2,62, 2011 turun menjadi 2,58 tahun 2012 menurun lagi menjadi 2,35 dan tahun 2013 meningkat 2,86 dan di tahun kemudian turun lagi 2,54.

Penurunan rasio ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor dimana jika rasio menurun menunjukkan ketergantungan impor semakin tinggi sebaliknya jika rasio meningkat maka ketergantungan terhadap impor menurun. Dari tahun 2010-2014 terlihat bahwa pada tahun 2012 merupakan tahun ketergantungan impor paling tinggi dan di tahun 2013 ketergantungan impor berkurang cukup besar.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Total penyediaan adalah jumlah produk yang digunakan dalam ekonomi yang berasal dari produksi domestik atau impor sehingga total penyediaan ini merupakan penjumlahan dari output dengan impor. Adapun keseimbangan antara total penyediaan dengan permintaan adalah keseimbangan antara total output dan Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan PDRB (ADHB)	1.252.734,13	1.417.879,20	1.608.252,99	1.698.630,75	1.932.573,07
(Miliar Rp) %	78,36	78,16	77,01	79,44	77,96
Total nilai Impor ADHB	346.048,37	396.250,60	480.007,31	439.716,27	546.613,63
(Miliar Rp) %	21,64	21,84	22,99	20,56	22,05
Total Permintaan Akhir ¹⁰	1.598.782,50	1.814.129,80	2.088.260,30	2.138.347,02	2.479.186,70
(Miliar Rp) %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari tabel tersebut diatas, dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan akhir masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari Rp. 1.598.782,50 miliar (2010) menjadi sebesar Rp. 2.479.186,7 miliar (2014). Untuk memenuhi jumlah permintaan sebagian produk masih harus didatangkan dari luar yaitu sekitar 22 persen dengan rasio impor tertinggi di tahun 2012 sebesar 22,99 persen dan terendah di tahun 2013 sebesar 20,56 persen. Adapun pemenuhan kebutuhan yang berasal dari produk domestik ada kecenderungan akan terus menurun seiring dengan

¹⁰ Termasuk diskrepansi statistik

meningkatnya rasio total impor. Provinsi Jawa Barat baru bisa memenuhi sekitar 78 persen dari selisih hasil produksi domestik. Untuk itu sangat diperlukan inovasi-inovasi baru sehingga akan meningkatkan pemenuhan permintaan akhir yang berasal dari produk domestik.

Di sisi lain secara rinci tiap tahun “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik Jawa Barat dari tahun 2010-2014 masing-masing sebesar Rp. 1.252.734,13 miliar (2010); Rp. 1.417.879,20 miliar (2011); Rp. 1.608.252,99 miliar (2012); Rp. 1.698.630,75 miliar (2013); dan Rp.1.932.573,07 miliar (2014). Adapun nilai impor masing-masing tahun sebesar Rp. 346.048,37 miliar (2010); Rp. 396.250,60 miliar (2011); Rp. 480.007,31 miliar (2012); Rp. 439.716,27 miliar (2013); dan Rp. 546.453,63 miliar (2014).

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi valuta yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran valuta masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran valuta keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	316.311,70	386.122,92	431.031,27	440.622,39	528.976,88
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	346.048,37	396.250,60	480.007,31	439.716,27	546.613,63
Net ekspor (X – M) (Miliar Rp)	(29.736,66)	(10.127,68)	(48.976,04)	906,12	(17.636,75)
Rasio ekspor thdp Impor	0,91	0,97	0,90	1,00	0,97

Selama periode 2010 - 2014, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Jawa Barat dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif kecuali tahun 2013 menunjukkan angka positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Jawa Barat dalam posisi defisit hanya di tahun 2013 menunjukkan surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa yang keluar, yang dalam konteks lain disebut sebagai “utang luar negeri”. Defisit perdagangan Provinsi Jawa Barat yang terjadi antara tahun 2010 sampai dengan 2014 tercatat masing-masing sebesar Rp. (29.736,660) miliar (2010), Rp. (10.127,697) miliar (2011), (48.976,04) miliar (2012) dan (17.636,75) miliar (2014). Hanya di tahun 2013 saja posisi perdagangan barang dan jasa mengalami surplus dimana nilai ekspor lebih besar daripada impor yaitu Rp. 906,12 miliar.

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2010-2012 dan tahun 2014. Pada tahun 2010 rasionya sebesar 0,91 menjadi sekitar 0,97 pada tahun 2011, kemudian 0,90 pada tahun 2012 dan di tahun 2014 sebesar 0,97. Terkecuali di tahun 2013 rasio ini berbalik arah yaitu sebesar 1,00.

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

**Tabel 25. Rasio Perdagangan Internasional,
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	226.580,61	244.867,28	261.968,65	280.459,29	329.487,87
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	136.658,47	160.660,65	162.875,84	174.967,76	185.811,81
(X - M) (Miliar Rp)	89.922,14	84.206,63	99.092,81	105.491,53	143.676,05
(X + M) (Miliar Rp)	363.239,08	405.527,93	424.844,49	455.427,04	515.299,68
R P I	0,25	0,21	0,23	0,23	0,28

Tabel 25. menggambarkan perkembangan ekspor dan impor luar negeri, terlihat bahwa pada periode tahun 2010-2014 posisi ekspor luar negeri selalu lebih tinggi dari pada impor luar negeri dengan kecenderungan terus meningkat. Begitu pula dengan kecenderungan impor, yang mempunyai pola hampir sama dengan ekspor, cenderung meningkat setiap tahun.

Nilai ekspor luar negeri adh Berlaku dari 226.580,61 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 329.487,87 miliar rupiah pada tahun 2014. Adapun untuk nilai impor adh Berlaku pada periode 2010-2014 menunjukkan kecenderungan terus meningkat namun masih di bawah nilai ekspor.

Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Jawa Barat pada periode 2010-2013 mengindikasikan bahwa aktivitas perdagangan internasional di Jawa Barat didominasi oleh kegiatan ekspor, meskipun dengan rasio yang cukup kecil yaitu kurang dari 1.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 26. Incremental Capital Output Ratio,
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar rupiah)	906,685.76	965,622.06	1,028,409.74	1,093,585.51	1,148,948.82
Perubahan (Miliar rupiah)	56,604.89	58,936.30	62,787.68	65,175.77	55,363.31
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rupiah)	221,524.24	245,323.57	271,070.80	277,764.79	305,989.33
ICOR	3.91	4.16	4.32	4.26	5.53

Apabila dicermati nilai ICOR Jawa Barat selama periode 2010-2014 terlihat bahwa selama tiga tahun pertama nilai ICOR memiliki tendensi yang meningkat dimana menunjukkan bahwa penambahan aset tetap pada sektor produksi signifikan dalam mendorong perekonomian Jawa Barat. Pada tahun 2013 nilai ICOR mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 4,26 persen, kemudian tahun berikutnya nilai ICOR kembali mengalami peningkatan signifikan sehingga berada pada posisi 5,53.

BAB V

PENUTUP

<http://jabar.bps.go.id>

1. PDRB menurut penggunaan tahun 2010 s.d 2014 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Jawa Barat pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2010 s.d 2014, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Jawa Barat terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

LAMPIRAN

<http://jabar.bps.go.id>

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	671.158.667	734.272.453	810.168.438	872.802.984
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	238.223.535	269.273.857	305.436.437	343.680.074
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	28.563.871	31.912.804	35.022.297	35.811.694
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraa	84.176.498	89.013.786	99.472.712	104.461.806
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	41.982.041	44.443.465	48.945.531	52.461.770
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	191.751.485	204.601.392	220.219.757	228.009.143
1.f. Hotel dan Restoran	47.346.363	51.058.095	54.290.767	57.176.596
1.g. Lainnya	39.114.873	43.969.055	46.780.937	51.201.901
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.396.177	6.859.562	8.518.791	9.189.586
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	59.786.927	68.994.158	73.717.545	81.202.692
3.a. Konsumsi Kolektif	33.026.755	37.638.704	41.628.105	46.353.994
3.b. Konsumsi Individu	26.760.172	31.355.454	32.089.440	34.848.698
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	252.467.435	294.079.170	307.053.893	362.665.094
4.a. Bangunan	172.293.013	201.886.557	217.457.606	268.802.001
4.b. Non-Bangunan	80.174.422	92.192.613	89.596.287	93.863.093
5. Perubahan Inventori	41.947.076	73.016.379	58.549.693	77.735.831
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	244.867.284	261.968.649	280.459.285	329.487.867
6.a. Barang	241.298.462	257.591.978	275.368.632	323.592.776
6.b. Jasa	3.568.822	4.376.672	5.090.653	5.895.091
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	160.660.650	162.875.842	174.967.759	185.811.813
7.a. Barang	147.952.461	148.850.912	157.916.845	164.006.475
7.b. Jasa	12.708.189	14.024.930	17.050.914	21.805.338
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(94.334.318)	(148.068.846)	(104.585.408)	(161.312.800)
8.a. Ekspor	141.255.633	169.062.622	160.163.104	199.489.015
8.b. Impor	235.589.951	317.131.467	264.748.512	360.801.815
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1.021.628.597	1.128.245.685	1.258.914.480	1.385.959.441

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	609.626.575	636.965.211	666.398.077	693.631.382	716.194.723
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	210.734.936	219.397.199	228.899.146	238.549.025	252.183.917
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	26.969.936	27.948.672	30.616.286	33.051.233	33.551.759
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggara	79.876.374	81.358.188	84.016.985	87.185.409	88.786.750
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	39.353.245	41.022.872	42.219.836	45.270.808	47.522.578
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	174.127.400	182.819.318	191.100.047	197.278.008	198.687.459
1.f. Hotel dan Restoran	44.399.426	46.592.064	49.418.072	51.082.000	50.947.886
1.g. Lainnya	34.165.256	37.826.898	40.127.705	41.214.900	44.514.374
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	6.045.257	6.262.355	6.529.562	7.466.064	7.726.701
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	54.922.081	54.949.787	58.348.054	58.827.921	61.314.913
3.a. Konsumsi Kolektif	30.126.857	30.042.268	31.934.783	33.310.045	34.613.136
3.b. Konsumsi Individu	24.795.224	24.907.520	26.413.270	25.517.876	26.701.777
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	221.524.237	245.323.571	271.070.796	277.764.785	305.989.335
4.a. Bangunan	151.644.250	166.521.297	186.619.324	196.724.344	227.999.823
4.b. Non-Bangunan	69.879.987	78.802.274	84.451.472	81.040.441	77.989.512
5. Perubahan Inventori	44.304.276	40.334.494	67.695.891	52.493.816	61.632.453
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	226.580.610	239.424.315	254.271.203	258.087.699	271.291.616
6.a. Barang	223.686.420	235.945.750	250.246.392	253.870.339	266.920.517
6.b. Jasa	2.894.189	3.478.564	4.024.811	4.217.360	4.371.099
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	136.658.473	152.080.767	142.905.277	145.679.502	146.956.072
7.a. Barang	124.081.521	139.334.658	130.018.061	132.102.004	131.636.450
7.b. Jasa	12.576.952	12.746.109	12.887.216	13.577.499	15.319.622
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(119.658.801)	(105.556.905)	(152.998.566)	(109.006.660)	(128.244.851)
8.a. Ekspor	89.731.094	131.010.552	150.354.051	133.247.165	149.624.995
8.b. Impor	209.389.895	236.567.457	303.352.617	242.253.825	277.869.846
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	906.685.760	965.622.061	1.028.409.740	1.093.585.505	1.148.948.817

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	65,69	65,08	64,35	62,97
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	23,32	23,87	24,26	24,80
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,80	2,83	2,78	2,58
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraa	8,24	7,89	7,90	7,54
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,11	3,94	3,89	3,79
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18,77	18,13	17,49	16,45
1.f. Hotel dan Restoran	4,63	4,53	4,31	4,13
1.g. Lainnya	3,83	3,90	3,72	3,69
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,63	0,61	0,68	0,66
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	5,85	6,12	5,86	5,86
3.a. Konsumsi Kolektif	3,23	3,34	3,31	3,34
3.b. Konsumsi Individu	2,62	2,78	2,55	2,51
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	24,71	26,07	24,39	26,17
4.a. Bangunan	16,86	17,89	17,27	19,39
4.b. Non-Bangunan	7,85	8,17	7,12	6,77
5. Perubahan Inventori	4,11	6,47	4,65	5,61
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	23,97	23,22	22,28	23,77
6.a. Barang	23,62	22,83	21,87	23,35
6.b. Jasa	0,35	0,39	0,40	0,43
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	15,73	14,44	13,90	13,41
7.a. Barang	14,48	13,19	12,54	11,83
7.b. Jasa	1,24	1,24	1,35	1,57
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(9,23)	(13,12)	(8,31)	(11,64)
8.a. Ekspor	13,83	14,98	12,72	14,39
8.b. Impor	23,06	28,11	21,03	26,03
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	67,24	65,96	64,80	63,43	62,33
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	23,24	22,72	22,26	21,81	21,95
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,97	2,89	2,98	3,02	2,92
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraa	8,81	8,43	8,17	7,97	7,73
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,34	4,25	4,11	4,14	4,14
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	19,20	18,93	18,58	18,04	17,29
1.f. Hotel dan Restoran	4,90	4,83	4,81	4,67	4,43
1.g. Lainnya	3,77	3,92	3,90	3,77	3,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,67	0,65	0,63	0,68	0,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	6,06	5,69	5,67	5,38	5,34
3.a. Konsumsi Kolektif	3,32	3,11	3,11	3,05	3,01
3.b. Konsumsi Individu	2,73	2,58	2,57	2,33	2,32
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	24,43	25,41	26,36	25,40	26,63
4.a. Bangunan	16,73	17,24	18,15	17,99	19,84
4.b. Non-Bangunan	7,71	8,16	8,21	7,41	6,79
5. Perubahan Inventori	4,89	4,18	6,58	4,80	5,36
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	24,99	24,79	24,72	23,60	23,61
6.a. Barang	24,67	24,43	24,33	23,21	23,23
6.b. Jasa	0,32	0,36	0,39	0,39	0,38
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	15,07	15,75	13,90	13,32	12,79
7.a. Barang	13,69	14,43	12,64	12,08	11,46
7.b. Jasa	1,39	1,32	1,25	1,24	1,33
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(13,20)	(10,93)	(14,88)	(9,97)	(11,16)
8.a. Ekspor	9,90	13,57	14,62	12,18	13,02
8.b. Impor	23,09	24,50	29,50	22,15	24,18
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	10,09	9,40	10,34	7,73
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	13,04	13,03	13,43	12,52
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,91	11,72	9,74	2,25
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraa	5,38	5,75	11,75	5,02
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,68	5,86	10,13	7,18
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,12	6,70	7,63	3,54
1.f. Hotel dan Restoran	6,64	7,84	6,33	5,32
1.g. Lainnya	14,49	12,41	6,40	9,45
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,80	7,24	24,19	7,87
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	8,86	15,40	6,85	10,15
3.a. Konsumsi Kolektif	9,63	13,96	10,60	11,35
3.b. Konsumsi Individu	7,92	17,17	2,34	8,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	13,97	16,48	4,41	18,11
4.a. Bangunan	13,62	17,18	7,71	23,61
4.b. Non-Bangunan	14,73	14,99	(2,82)	4,76
5. Perubahan Inventori	(5,32)	74,07	(19,81)	32,77
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	8,07	6,98	7,06	17,48
6.a. Barang	7,87	6,75	6,90	17,51
6.b. Jasa	23,31	22,64	16,31	15,80
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	17,56	1,38	7,42	6,20
7.a. Barang	19,24	0,61	6,09	3,86
7.b. Jasa	1,04	10,36	21,58	27,88
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(21,16)	56,96	(29,37)	54,24
8.a. Ekspor	57,42	19,69	(5,26)	24,55
8.b. Impor	12,51	34,61	(16,52)	36,28
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	12,68	10,44	11,58	10,09

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,48	4,62	4,09	3,25
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,11	4,33	4,22	5,72
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,63	9,54	7,95	1,51
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraa	1,86	3,27	3,77	1,84
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,24	2,92	7,23	4,97
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,99	4,53	3,23	0,71
1.f. Hotel dan Restoran	4,94	6,07	3,37	(0,26)
1.g. Lainnya	10,72	6,08	2,71	8,01
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,59	4,27	14,34	3,49
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	0,05	6,18	0,82	4,23
3.a. Konsumsi Kolektif	(0,28)	6,30	4,31	3,91
3.b. Konsumsi Individu	0,45	6,05	(3,39)	4,64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	10,74	10,50	2,47	10,16
4.a. Bangunan	9,81	12,07	5,41	15,90
4.b. Non-Bangunan	12,77	7,17	(4,04)	(3,76)
5. Perubahan Inventori	(8,96)	67,84	(22,46)	17,41
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	5,67	6,20	1,50	5,12
6.a. Barang	5,48	6,06	1,45	5,14
6.b. Jasa	20,19	15,70	4,78	3,65
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	11,29	(6,03)	1,94	0,88
7.a. Barang	12,29	(6,69)	1,60	(0,35)
7.b. Jasa	1,34	1,11	5,36	12,83
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(11,79)	44,94	(28,75)	17,65
8.a. Ekspor	46,00	14,76	(11,38)	12,29
8.b. Impor	12,98	28,23	(20,14)	14,70
PDRB (1+2+3+4+5+6-7+8)	6,50	6,50	6,34	5,06

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100	110	109	110	108
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100	113	113	113	113
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100	106	112	110	102
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraa	100	105	106	112	105
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100	107	106	110	107
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100	110	107	108	104
1.f. Hotel dan Restoran	100	107	108	106	105
1.g. Lainnya	100	114	112	106	109
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100	106	107	124	108
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100	109	115	107	110
3.a. Konsumsi Kolektif	100	110	114	111	111
3.b. Konsumsi Individu	100	108	117	102	109
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100	114	116	104	118
4.a. Bangunan	100	114	117	108	124
4.b. Non-Bangunan	100	115	115	97	105
5. Perubahan Inventori	100	95	174	80	133
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	100	108	107	107	117
6.a. Barang	100	108	107	107	118
6.b. Jasa	100	123	123	116	116
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	100	118	101	107	106
7.a. Barang	100	119	101	106	104
7.b. Jasa	100	101	110	122	128
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100	79	157	71	154
8.a. Ekspor	100	157	120	95	125
8.b. Impor	100	113	135	83	136
PDRB (1+2+3+4+5+6-7+8)	100	113	110	112	110

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100	104	105	104	103
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100	104	104	104	106
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100	104	110	108	102
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraa	100	102	103	104	102
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100	104	103	107	105
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100	105	105	103	101
1.f. Hotel dan Restoran	100	105	106	103	100
1.g. Lainnya	100	111	106	103	108
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100	104	104	114	103
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100	100	106	101	104
3.a. Konsumsi Kolektif	100	100	106	104	104
3.b. Konsumsi Individu	100	100	106	97	105
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100	111	110	102	110
4.a. Bangunan	100	110	112	105	116
4.b. Non-Bangunan	100	113	107	96	96
5. Perubahan Inventori	100	91	168	78	117
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	100	106	106	102	105
6.a. Barang	100	105	106	101	105
6.b. Jasa	100	120	116	105	104
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	100	111	94	102	101
7.a. Barang	100	112	93	102	100
7.b. Jasa	100	101	101	105	113
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100	88	145	71	118
8.a. Ekspor	100	146	115	89	112
8.b. Impor	100	113	128	80	115
PDRB (1+2+3+4+5+6-7+8)	100	107	107	106	105

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100	105	110	117	122
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100	109	118	128	136
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100	102	104	106	107
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraa	100	103	106	114	118
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100	102	105	108	110
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100	105	107	112	115
1.f. Hotel dan Restoran	100	102	103	106	112
1.g. Lainnya	100	103	110	114	115
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	100	102	105	114	119
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100	109	118	125	132
3.a. Konsumsi Kolektif	100	110	118	125	134
3.b. Konsumsi Individu	100	107	119	126	131
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100	103	108	111	119
4.a. Bangunan	100	103	108	111	118
4.b. Non-Bangunan	100	102	109	111	120
5. Perubahan Inventori	100	104	108	112	126
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	100	102	103	109	121
6.a. Barang	100	102	103	108	121
6.b. Jasa	100	103	109	121	135
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	100	106	114	120	126
7.a. Barang	100	106	114	120	125
7.b. Jasa	100	100	109	126	142
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100	89	97	96	126
8.a. Ekspor	100	108	112	120	133
8.b. Impor	100	100	105	109	130
PDRB (1+2+3+4+5+6-7+8)	100	106	110	115	121

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5,37	4,57	6,00	4,34
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,58	8,34	8,84	6,44
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,20	1,99	1,66	0,73
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraa	3,46	2,40	7,69	3,12
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,34	2,86	2,71	2,11
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,89	2,08	4,26	2,80
1.f. Hotel dan Restoran	1,62	1,67	2,87	5,59
1.g. Lainnya	3,40	5,96	3,59	1,34
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,14	2,86	8,61	4,24
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	8,80	8,68	5,97	5,69
3.a. Konsumsi Kolektif	9,93	7,21	6,03	7,16
3.b. Konsumsi Individu	7,44	10,49	5,93	3,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	2,91	5,42	1,90	7,22
4.a. Bangunan	3,47	4,56	2,18	6,66
4.b. Non-Bangunan	1,74	7,30	1,27	8,86
5. Perubahan Inventori	4,00	3,71	3,41	13,08
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	2,27	0,74	5,48	11,76
6.a. Barang	2,27	0,65	5,38	11,77
6.b. Jasa	2,59	5,99	11,00	11,73
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	5,64	7,89	5,38	5,28
7.a. Barang	6,18	7,82	4,42	4,22
7.b. Jasa	(0,30)	9,15	15,39	13,34
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(10,63)	8,29	(0,86)	31,10
8.a. Ekspor	7,82	4,29	6,90	10,92
8.b. Impor	(0,41)	4,98	4,54	18,81
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	5,80	3,69	4,93	4,79

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

<http://jabar.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri*, 1980-1990, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD*, 1997, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Barat* Edisi Januari 2015, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI (Jabar-Banten), 2015
13. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
14. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
15. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
16. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
17. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
18. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
19. _____, *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
20. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
21. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
22. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
23. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993
24. World Bank, et al, *System of National Accounts 2008*, New York, 2009

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat
Telp.: 022 7272595; 022 7201696; Faks.: 022 7213572
E-Mail: bps3200@bps.go.id
Website: <http://jabar.bps.go.id>